

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Akhir abad 20 dan awal abad 21 ditandai oleh adanya suatu proses penyatuan dunia menjadi sebuah ruang yang tanpa batas. Proses tersebut kita kenal dengan nama globalisasi. Globalisasi terjadi pada hampir setiap bidang, termasuk pada bidang ekonomi.

Globalisasi ekonomi ini menimbulkan suatu tantangan bagi institusi negara dalam mengatur lalu lintas tenaga kerja, barang, dan jasa. Untuk menjawab tantangan itu, maka banyak negara di dunia yang kemudian cenderung memilih untuk mengintegrasikan ekonomi mereka berdasarkan kedekatan geografis.¹ Kecenderungan ini dinamakan regionalisme.

Salah satu contoh regionalisme ini adalah *Association of South East Asian Nations* (ASEAN). Meskipun tidak mengkhususkan pada kerjasama bidang ekonomi, namun ASEAN juga tidak melalaikan perkembangan perekonomiannya. Hal ini terbukti dengan keberhasilan negara-negara anggotanya dalam meningkatkan nilai perdagangan.

Pasca krisis moneter yang melanda hampir seluruh Asia pada tahun 1997, ASEAN mulai tertarik untuk bekerjasama dengan Negara-negara Asia Timur

¹ Menurut Wyatt-Walter, selain kedekatan geografis, faktor-faktor yang turut mendorong pembentukan regionalisme antara lain interaksi histories yang memiliki basis kesamaan budaya, hukum, dan politik, sebagai alat yang efektif bagi Negara-negara kecil untuk memiliki daya tawar yang lebih besar terhadap negara-negara besar dan sebagai daya tarik bagi investor asing untuk

Laut, terutama dengan Republik Rakyat China (RRC), Jepang, dan Korea Selatan. Menyadari pentingnya peranan dan kekuatan yang dimiliki oleh ketiga Negara tadi, terutama untuk membantu pemulihan perekonomian Negara-negara ASEAN, maka kesepuluh Negara ASEAN berinisiatif untuk mengembangkan kerjasama regional yang lebih luas. Kerjasama inilah yang kemudian disebut sebagai ASEAN+3.

Munculnya ASEAN+3 memberi ide bagi penulis untuk mengangkat tema mengenai kerjasama ASEAN, terutama dengan Jepang. Tema ini penulis anggap menarik, karena Jepang yang pada masa dahulu tidak setuju dengan pembentukan forum regionalisme selain *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, sekarang justru begitu antusias dengan pembentukan ASEAN+3.

Hal-hal itulah yang mendorong penulis untuk meneliti fenomena tersebut sebagai sebuah karya ilmiah. Untuk itu penulis mengajukan judul : **“Peran Jepang Dalam ASEAN+3”**

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan peran yang dilakukan Jepang dalam forum kerjasama ASEAN+3.
2. Untuk membuktikan teori-teori yang pernah penulis peroleh

3. Sebagai pelengkap tugas akhir dalam upaya meraih gelar S1 dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

C. Latar Belakang Masalah

Sebenarnya, globalisasi bukanlah suatu fenomena baru, dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Salah satu ciri globalisasi adalah hilangnya batas-batas antar negara. Globalisasi diperkuat dengan makin sempitnya jarak antar negara yang disebabkan karena kecanggihan teknologi transportasi dan alat komunikasi.

Globalisasi juga ikut melanda bidang ekonomi. Dinamika ekonomi internasional sejak tahun 1980-an telah ikut berperan dalam mempercepat proses globalisasi ekonomi. Saat itu banyak negara industri baru dan negara-negara yang sedang berkembang merubah kebijakan ekonomi impor ke ekspor, sehingga perdagangan antar negarapun semakin aktif. Karena perdagangan antar negara semakin aktif, maka kemakmuran masing-masing negara semakin baik.

Globalisasi ekonomi ternyata menyebabkan banyak negara yang kemudian cenderung memilih melakukan regionalisme, terutama pada bidang ekonomi. Regionalisme ekonomi adalah pengintegrasian ekonomi berdasarkan kedekatan geografis. Regionalisme atau integrasi ekonomi ini bisa dikatakan merupakan kebutuhan bagi negara-negara berkembang maupun negara industri baru untuk mempertahankan diri dan menggalang persatuan menghadapi kekuatan ekonomi negara-negara maju. Ada banyak contoh organisasi perdagangan yang dibentuk

berdasarkan regionalisme. Beberapa diantaranya adalah ASEAN (*Association of South East Asian Nations*), APEC (*Asian Pacific Economic Cooperation*), dan EEC (*European Economic Community*).

ASEAN, yang dibentuk berdasarkan deklarasi Bangkok 8 Agustus 1967, sesuai dengan namanya, merupakan perhimpunan bangsa-bangsa di kawasan Asia Tenggara. Anggota ASEAN saat ini berjumlah sepuluh negara, dan kesemuanya berada di Asia Tenggara.

Pada dasarnya, kerjasama yang dilakukan ASEAN mencakup bidang-bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi, ekonomi hanyalah satu dari beberapa bidang kerjasama ASEAN. Kerjasama ekonomi ASEAN ini mencapai bentuk formalnya pada bulan Februari 1976. Ternyata kerjasama ekonomi ini cukup sukses. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan nilai perdagangan intra ASEAN pada tahun 2001 sebesar US\$ 152,1 milyar. Nilai tersebut meningkat 85% dibandingkan pada tahun 1993, yang tercatat hanya sebesar US\$ 82,4 milyar.²

Memasuki era globalisasi, integrasi regional ASEAN mulai lebih memperhatikan pembentukan kerjasama ekonomi agar tercipta suatu persiapan bersama sehingga negara-negara anggota ASEAN mampu menghadapi persaingan ekonomi dengan negara-negara lain (non ASEAN). Hasilnya adalah kesepakatan Pasar Bersama ASEAN yang dimulai tiga tahun kedepan.³

Kebutuhan untuk menguatkan ikatan regional sangat dirasakan oleh negara-negara ASEAN, mengingat tantangan besar yang akan dihadapi ASEAN,

² http://www.aseansec.org/trade/files/an_int_co.xls

dimana pada era pasar bebas negara-negara ASEAN akan saling berkonfrontasi secara ekonomi. Sekjen ASEAN, Rudolfo C. Severino, Jr, dalam ceramahnya mengatakan;

*'Respon untuk menghadapi persaingan global harus dilakukan secara regional. ASEAN harus menguatkan ikatan solidaritasnya atau akan terpecah...Anggota ASEAN harus melakukan kerjasama yang lebih kuat jika ingin meningkatkan kekuatan ekonomi regional.'*⁴

Krisis keuangan Asia pada tahun 1997 membuat negara-negara ASEAN mulai menyadari pentingnya kekuatan dan peranan negara-negara Asia Timur Laut, seperti RRC, Jepang, dan Korea Selatan. ASEAN mengajak mereka untuk mengembangkan kerjasama regional secara lebih luas. Dengan demikian mulai dirancang pembentukan forum kerjasama ASEAN+3.

Sementara itu, Jepang yang lebih menitikberatkan kebijakannya pada pembangunan ekonomi dengan strategi meningkatkan kekuatan perekonomiannya ternyata cukup berhasil. Angka pertumbuhan ekonomi Jepang meningkat dengan pesat. Bahkan saat ini Jepang telah menjelma dari negara yang kalah perang dan hancur perekonomiannya menjadi salah satu raksasa ekonomi dunia.

Kebijakan yang lebih dititikberatkan pada bidang ekonomi ternyata membawa implikasi pada bidang politik, berupa terciptanya imej *low profile* dalam *performance* politik luar negerinya. Ini tampak pada sikap Jepang dalam menyikapi masalah-masalah internasional, dimana Jepang cenderung bersikap

³ Suara Karya, 4 februari 2004.

mengikuti negara-negara Barat serta Amerika Serikat yang menjadi sekutunya, serta menahan diri dari peran internasional yang lebih aktif.

Kepasifan sikap Jepang ini juga disebabkan oleh doktrin yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri (waktu itu) Yoshida Shigeru pada akhir tahun 1940-an. Doktrin Yoshida ini antara lain berisi bahwa Jepang harus memusatkan kebijakannya pada pembangunan ekonomi dan menjaga sikap *low profile* di bawah lindungan Amerika Serikat. Sehingga dapat dipahami bahwa Amerika Serikat memiliki peran yang dominan dalam penentuan sikap dan kebijakan yang diambil pemerintah Jepang.

Memasuki tahun 1990-an, kekuatan ekonomi muncul sebagai isu dominan dalam hubungan internasional, menggantikan *power politics*. Perubahan-perubahan ini juga menyebabkan Jepang sebagai kekuatan ekonomi dunia dituntut untuk lebih aktif memainkan peran politik dalam masalah-masalah internasional.

Ada beberapa alasan penyebab munculnya tuntutan ini⁵, yaitu pertama, berakhirnya perang dingin telah menghapus polarisasi dua blok di kawasan Asia Pasifik dan menghilangkan bahaya konfrontasi militer antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua, Jepang sebagai kekuatan ekonomi terkemuka di dunia saat ini sudah seharusnya dapat menjadi negara yang mandiri dan memainkan peran politik dan militer yang setara dengan kemampuan ekonominya.

Pemerintah Jepang kemudian mengambil tindakan-tindakan yang menunjukkan kepedulian internasionalnya, meski hal ini pun masih mengundang perdebatan baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya adalah

keikutsertaan Jepang dalam kegiatan-kegiatan pemeliharaan perdamaian PBB. Bahkan Jepang, bersama Australia, merupakan pemrakarsa dalam pembentukan APEC.

Sedangkan sebagai mitra sesama negara Asia, Jepang juga melakukan kerjasama-kerjasama dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial, kebudayaan, dll kepada ASEAN. Setiap tahun diadakan pertemuan (*meeting*) dan pertukaran (*exchange*), baik di tingkat puncak maupun tingkat menteri, seperti KTT Jepang-ASEAN, PMC, AEM-METI, dan sebagainya guna membangun hubungan baik Jepang dan ASEAN.

Ketika krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997, Jepang memberikan bantuan sejumlah total US\$ 80 milyar bagi penanggulangan krisis ekonomi dan bangkitnya kembali ekonomi. Bantuan yang diberikan terutama bagi negara-negara ASEAN ini ternyata sangat efektif.

Pertemuan negara-negara ASEAN dengan RRC yang kemudian disusul oleh pertemuan dengan Jepang dan Korea Selatan, yang merupakan negara-negara besar di Asia Timur, dalam waktu yang tidak terlalu lama mengesankan kita bahwa Jepang sangat antusias dalam bekerjasama dengan ASEAN, dan diwujudkan dalam bentuk kompetisi untuk merangkul ASEAN.

Bila kita memperhatikan jarak waktu antara masuknya RRC dengan Jepang yang tidak terlalu lama akan mengesankan telah terjadi suatu persaingan Jepang dan RRC. Banyak analis yang berpendapat bahwa persaingan Jepang-China untuk melembagakan kerjasama ekonomi regional sebagai lebih

bermotifkan politis daripada ekonomis. Hal ini dapat dilihat berdasarkan sejarah konflik antara kedua negara, disamping itu masing-masing menganggap pihak lain sebagai lawan. Karenanya, keduanya kemudian melihat ASEAN sebagai arena perebutan kepemimpinan pembangunan ekonomi kawasan.

Keantusiasan Jepang untuk masuk ASEAN+3 ini berbeda dengan sikap Jepang pada awal 1990-an yang memilih menolak EAEC (East Asia Economic Caucus), sebuah lembaga kerjasama negara-negara ASEAN dengan negara-negara Asia Timur yang menjadi cikal bakal ASEAN+3. Penolakan Jepang pada waktu itu dengan alasan telah adanya lembaga kerjasama ekonomi regional Asia-Pasifik (APEC) yang mewadahi semua negara di Asia Pasifik, dimana Jepang bersama Australia menjadi pelopornya.

Dengan melihat keanggotaan APEC yang meliputi seluruh negara kawasan Asia Pasifik, dimana Amerika Serikat dan beberapa negara besar lain masuk didalamnya, maka kita dapat mengerti dengan penolakan Jepang tersebut. Keanggotaan Jepang dalam EAEC dapat menimbulkan kesan, terutama oleh AS, bahwa Jepang berusaha menghimpun kembali kekuatan eksklusif dengan negara-negara Asia Timur, dan mungkin akan berakibat ditutupnya pasar domestik AS bagi barang-barang ekspor Jepang.

D. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah:

- Bagaimana peran Jepang dalam forum kerjasama ASEAN+3?

E. Kerangka Dasar Teoritik

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga bisa menjadi dasar bagi prediksi. Selain itu, konsep dapat juga digunakan untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi suatu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep-konsep itu secara logis saling berhubungan.⁶

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa konsep. Konsep pertama adalah konsep kepentingan nasional, kemudian politik luar negeri, teori *neo liberal institutionalism*, dan yang terakhir adalah perspektif reformis tentang ekonomi politik internasional.

Faktor utama dan mendasar yang memandu para pembuat kebijakan dalam memutuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional. Ini menyebabkan konsep kepentingan nasional menjadi suatu konsep yang umum dan luas, namun mencakup berbagai unsur yang vital bagi sebuah negara antara lain kelangsungan hidupnya, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Para analis sepakat bahwa pembenar utama bagi tindakan suatu Negara adalah kepentingan nasional.

Namun dalam hal konseptualisasi dan definisi, para ilmuwan dan praktisi mengalami perbedaan pendapat. Beberapa ilmuwan yang mencoba

⁶

internasional, mereka lebih bersikap internasionalis daripada nasionalis. Mereka lebih percaya pada upaya reformasi daripada perubahan radikal revolusioner.

Seperti halnya kaum radikal, para reformis ini memandang hubungan ekonomi internasional sekarang ini merugikan pihak yang lebih lemah. Tetapi berbeda dengan kaum radikal, mereka percaya bahwa keadaan itu bisa diubah sehingga menguntungkan semua pihak asalkan dilakukan reformasi struktur hubungan ekonomi internasional. Dalam proses restrukturisasi ini pemerintah NKB harus aktif ikut campur dan mengambil inisiatif dalam kegiatan ekonomi luar negeri. Mereka harus aktif memanfaatkan organisasi internasional untuk melakukan "*bargaining*" dengan pemerintah NIM (Negara Industri Maju) dan dengan kapitalis internasional.

Jadi, yang penting bukannya meninggalkan arena internasional dan menutup diri dengan "*autarky*", tetapi berusaha menciptakan suatu tatanan baru untuk mengatur hubungan ekonomi sehingga NKB-NKB bisa memperoleh hasil yang adil dari perdagangan luar negeri. Agar reformasi hubungan internasional itu bisa efektif, harus ada kerjasama efektif antara semua negara yang terlibat melalui suatu organisasi yang berfungsi demi kepentingan NKB. Inilah yang kemudian disebut sebagai strategi "*collective self reliance*" dan "*collective bargaining*". Para pendukung konsepsi reformis ini yakin bahwa gagasan TEIB itulah yang bisa menghasilkan hubungan internasional yang lebih damai dan menjamin lebih banyak keuntungan pada setiap negara yang terlibat¹⁰.

¹⁰

Globalisasi yang telah berlangsung saat ini dan pasar bebas APEC yang sebentar lagi akan dimulai membuat negara-negara ASEAN yang sebagian besar merupakan negara-negara berkembang merasa dirugikan dan terancam perekonomiannya. Untuk merubah keadaan itu dan membuat kondisi hubungan ekonomi antara negara-negara berkembang dengan negara-negara maju menjadi lebih baik, maka diperlukan suatu kerjasama ekonomi internasional maupun regional yang efektif.

Kerjasama ekonomi regional ini kemudian diwujudkan dengan membentuk ASEAN+3, dengan mengajak Jepang, RRC dan Korsel. Meskipun ketiga negara Asia Timur ini termasuk negara-negara industri maju, namun ketiganya telah memiliki komitmen kuat untuk memajukan perekonomian kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dengan bersama-sama. Komitmen ini dibuktikan dengan banyaknya hasil perjanjian yang telah mereka buat, baik yang telah terealisasi maupun yang belum.

Sebagai sebuah bentuk regionalisme, penulis mencoba memahami ASEAN+3 dengan menggunakan teori *neo-liberal institutionalism*. Asumsi dasar yang dibangun oleh teori ini ada tiga. **Pertama**, semakin meningkatnya tingkat ketergantungan akan melahirkan tuntutan yang lebih besar bagi terbentuknya kerjasama internasional. Institusi menjadi cara mengatasi faktor ketidakpastian yang sering mempengaruhi hubungan antar negara. **Kedua**, negara adalah aktor rasional dan egois yang bisa diajak bekerjasama, dimana negara merupakan aktor utama. Kaum neo liberal meyakini bahwa keberhasilan kolaboratif mengatasi

negara anggota forum dalam menghadapi pasar bebas dan globalisasi akan semakin matang. Peran negara juga akan semakin kuat.

Sebagaimana asumsi ketiga teori *neo-liberal institutionalism*, ASEAN+3 akan menjadi penting, karena institusi ini akan menyebabkan keuntungan bagi negara-negara anggotanya.

Teori *neo-liberal institutionalism* ini memfokuskan pada interaksi strategis yang bisa jadi berujung pada lahirnya kerjasama pada suatu wilayah tertentu. Ada dua hal yang mendorong lahirnya integrasi ekonomi regional, yaitu: Pertama, masalah material yang membutuhkan manajemen kolektif. Kedua, insentif untuk mengurangi ongkos transaksi dan memfasilitasi keterkaitan intra regional.¹²

Teori *neo-liberal institutionalism* dipilih penulis karena unit analisa dan eksplanasi yang digunakan teori dan penulis sama, yaitu negara bangsa dan tingkat regional. Selain itu, alasan lainnya adalah bahwa ASEAN+3 merupakan jenis kerjasama regional yang agak longgar dan kurang terinstitusionalisasi dengan baik seperti EU. Para penggagas ASEAN+3 adalah aktor negara, dan bukannya kelompok kepentingan.

F. Hipotesa

Berdasarkan kerangka berpikir diatas, dapat diambil hipotesa tentang peran dan kepentingan Jepang dengan ikutserta dalam ASEAN+3. Hipotesanya adalah:

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, yang memuat alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka berpikir, hipotesa, metode penelitian, jangkauan penelitian, sistematika penulisan, serta kerangka penulisan.
- BAB II** : Pada Bab II akan dijelaskan mengenai gambaran umum politik luar negeri Jepang, meliputi politik luar negeri Jepang secara umum, politik luar negeri Jepang bidang ekonomi, dan terakhir adalah politik luar negeri Jepang terhadap negara-negara ASEAN, terutama dalam hal ekonomi.
- BAB III** : Bab III akan membahas mengenai proses terbentuknya ASEAN+3, tujuan pembentukannya, serta manfaat yang akan diperoleh bagi negara-negara anggotanya. Akan dijelaskan pula posisi Jepang dalam ASEAN+3 tersebut.
- BAB IV** : Dalam Bab IV akan dibahas mengenai peran yang akan diambil Jepang dalam forum kerjasama ASEAN+3. Akan dibahas pula kepentingan nasional yang dimiliki Jepang dengan mengikuti forum kerjasama ini, serta apa yang akan diperoleh Jepang dengan mengikuti ASEAN+3.
- Bab V** : Kesimpulan, dalam penelitian kesimpulan merupakan hasil analisis yang berasal dari hipotesa yang sudah dicocokkan dengan fakta di lapangan sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut:

mendefinisikan konsep kepentingan nasional adalah Jack C. Plano dan Roy Olton.

Menurut mereka, Kepentingan Nasional adalah :

(The fundamental objective ultimate determinant that guides the decision maker of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those alignment that constitute the state most vital needs. These include self preservation, independence, territorial integrity, military security and economic well being).⁷

Dari definisi tersebut bisa disimpulkan bahwa prioritas kepentingan nasional setiap negara berbeda-beda, tergantung pada kebutuhan negara yang bersangkutan. Namun, para ahli cenderung untuk menempatkan *survival* atau *self preservation* sebagai prioritas utama.

Konsep kepentingan nasional memuat arti yang inheren yaitu kelangsungan hidup atau *survival*. Menurut Morgenthau, kemampuan minimum negara-bangsa adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara lain.⁸ Bila diterjemahkan dalam pengertian yang lebih spesifik “Negara-bangsa harus bisa mempertahankan integritas teritorialnya (yaitu identitas fisiknya), mempertahankan ekonomi politiknya (yaitu identitas politiknya), yang mungkin saja demokrasi, otokrasi, sosialis, komunis, bahkan paham tentang suatu ideologi ekonomi politiknya, dan sebagainya, serta memelihara norma-norma, linguistik dan sejarah (yaitu identitas kulturalnya)”. Dalam pandangan Morgenthau, dari tujuan-tujuan umum ini para pemimpin suatu negara bisa menurunkan kebijakan-kebijakan spesifik terhadap negara lain, baik yang bersifat kerjasama maupun konflik

Kepentingan nasional merupakan tujuan nasional yang dijadikan dasar dan penentu utama yang menjadi pemandu para pembuat kebijakan dalam menentukan politik luar negeri satu negara dengan negara lain berbeda-beda sasaran yang hendak dituju, namun pada umumnya berkisar pada lima kategori umum yaitu: (1) *self preservation*, yaitu hak untuk mempertahankan diri; (2) *independence*, yang berarti tidak dijajah atau tunduk pada negara lain; (3) *military security*, berarti tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain, (4) *territorial integrity*, atau keutuhan wilayah dan (5) *economic well being* atau kesejahteraan ekonomi.

Kepentingan Jepang dengan masuk dalam ASEAN+3 berdasarkan pada kepentingan ekonomi jangka panjang yang akan diperoleh Jepang dengan kerjasama tersebut. Kepentingan dalam arti ini hampir sejalan dengan kategorisasi yang dibuat oleh Holsti mengenai tujuan kebijakan luar negeri. Salah satu dari tiga tipe tujuan jangka menengah yang dikemukakan Holsti adalah usaha pemerintah untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan perbaikan ekonomi melalui tindakan internasional. Yang menjadi komitmen utama dari banyak pemerintahan modern dewasa ini adalah mengejar tindakan yang memiliki dampak tertinggi terhadap kebutuhan dan kesejahteraan serta harapan dalam negeri.

Kepentingan nasional yang dianggap perlu oleh Jepang untuk diperjuangkan adalah dalam rangka mengurangi permasalahan yang timbul sebagai akibat dari globalisasi. Permasalahan-permasalahan tersebut hanya akan dapat teratasi apabila Jepang melakukan kerjasama regional dengan negara-negara lain (dalam hal ini ASEAN). Apalagi, Jepang melihat kawasan ASEAN sebagai

wilayah yang memiliki potensi pangsa pasar terbesar di dunia, sehingga akan sangat menguntungkan secara ekonomis bagi Jepang bila mau bekerjasama.

Faktor situasional didefinisikan oleh Plano dan Olton sebagai variabel internasional yang diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan dalam merumuskan politik luar negeri. Faktor situasional mencakup tiga hal yakni keadaan atau lingkungan internasional secara umum, *power* atau kapabilitas yang dimiliki negara itu dan tindakan serta reaksi balik yang dilakukan oleh negara lain.⁹ Ketiga hal tersebut akan digunakan untuk menjawab peran yang dilakukan Jepang dalam forum kerjasama ASEAN+3.

Faktor pertama, yaitu keadaan atau lingkungan internasional secara umum dapat kita lihat dengan sorotan masyarakat terhadap Jepang. Jepang dianggap sebagai negara yang hanya memfokuskan diri pada bidang ekonomi. Padahal, sebagai suatu negara yang memiliki kekuatan ekonomi yang super besar, Jepang seharusnya dapat lebih aktif dalam mengatasi permasalahan internasional. Hal tersebut membuat banyak negara mengkritik Jepang agar peduli dan ikut serta dalam mengatasi masalah-masalah internasional. Masuknya Jepang dalam ASEAN+3 barangkali juga disebabkan oleh hal tersebut.

Secara militer, *power* atau kapabilitas yang dimiliki Jepang memang kecil. Namun, Jepang merupakan salah satu raksasa ekonomi dunia. Sudah sewajarnya apabila Jepang mulai memperhatikan permasalahan di dunia internasional. Apalagi dengan *power* yang dimiliki Jepang di bidang ekonomi, diharapkan agar Jepang mau membantu dan bekerjasama dengan negara-negara ASEAN, terutama

dalam perekonomian. Sehingga negara-negara ASEAN dapat memulihkan perekonomiannya yang pernah lumpuh akibat krisis keuangan Asia, juga lebih siap dalam menghadapi globalisasi dan pasar bebas.

Reaksi negara-negara dalam memandang keaktifan Jepang beraneka ragam. Ada yang menyetujui, ada pula yang mengkritik. Negara-negara ASEAN sendiri, kebanyakan sangat setuju dengan keikutsertaan Jepang dalam ASEAN+3. Karena dengan keikutsertaan Jepang tersebut, akan menambah *power* negara-negara ASEAN secara ekonomis. Untuk lebih memahami kerjasama ekonomi yang dilakukan ASEAN+3, kita akan melihatnya dari perspektif reformis ekonomi politik internasional. Pada dasarnya perspektif yang juga dikenal sebagai konsepsi Tata Ekonomi Internasional Baru (TEIB) ini muncul sebagai kritik terhadap perspektif-perspektif sebelumnya dalam Ekonomi Politik Internasional (EPI), yakni merkantilisme, liberal dan marxis. Mereka memang melihat kebenaran dalam argumen kaum liberal ketika para liberalis ini menentang nasionalisme sempit kaum merkantilis, namun mereka juga tidak setuju dengan penekanan berlebihan kaum liberal terhadap pertimbangan nilai efisiensi sehingga merugikan aktor yang lebih lemah. Mereka setuju dengan kaum radikal yang menunjukkan bahaya liberalisme bagi si lemah, namun kaum reformis juga tidak setuju dengan usul kaum radikal agar NKB (Negara Kurang Berkembang) melakukan perubahan revolusioner menentang sistem kapitalis. Juga, walaupun mereka setuju dengan gagasan merkantilis mengenai peran aktif negara dalam urusan ekonomi

⁸ Ibid, hal 7.

masalah bersama akan memperkuat peran negara. Ketiga, institusi menjadi penting karena keuntungan dan dampaknya yang akan diperoleh suatu negara.¹¹

Berdasarkan asumsi-asumsi diatas, kita akan dapat memahami, mengapa Jepang bersedia bergabung dalam forum kerjasama ASEAN+3. Seperti halnya negara-negara lain pada masa modern ini, Jepang juga memiliki ketergantungan dengan negara-negara lain. Ketergantungan Jepang yang terbesar adalah dengan Amerika Serikat, terutama dalam masalah keamanan dari serangan luar. Dalam hal ekonomi, ternyata Jepang mulai merasakan adanya saling ketergantungan dengan negara-negara ASEAN. Negara-negara ASEAN jelas bergantung secara ekonomi pada Jepang, mereka membutuhkan bantuan Jepang untuk memperbaiki perekonomian mereka. Sedangkan Jepang membutuhkan pasar untuk barang-barang produksinya di Asia Tenggara, selain itu, dengan ikutnya Jepang dalam kerjasama ini, maka nama baik Jepang ikut terangkat, karena telah turut serta dalam proses pembangunan ekonomi di Asia Tenggara.

Meskipun Jepang adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, namun ternyata Jepang juga memiliki kekhawatiran dengan globalisasi dan pasar bebas yang akan segera muncul dan berlaku. Masalah-masalah tersebut adalah masalah bersama yang harus dihadapi oleh setiap negara didunia ini. Dalam hal ini Jepang bekerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara dan dua negara Asia Timur lainnya (Cina dan Korsel). Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk menghadapi globalisasi dan pasar bebas. Dengan kerjasama yang baik dalam forum regional ASEAN+3, diharapkan kesiapan setiap

¹¹ Fawcett, Louise & Hurrell, Andrew, *Regionalism in World Politics: Regional Organization and*